

KONSEP NEGARA DAN KEKUASAAN DALAM PANDANGAN POLITIK IBNU KHALDUN

Iqbal Muhammad Rodli, Amalia Ulfa, Heru Iskandar
Muda

UIN Sunan Ampel Surabaya

*Iqbalrodli91@gmail.com, ameliaulfa992@gmail.com,
heruiskandarmuda46@gmail.com*

Abstract

This article reviews two terms, namely state and power which basically have different and even conflicting meanings, but in practice in social life citizenship is interpreted as a duality that cannot be separated, because it has continuity and needs each other. The state as an organization is a necessity in social life, starting from the smallest structures such as the family to larger structures such as society. Meanwhile, the form of a state is reflected in the prevailing system, which is integrated as the power to govern. This study uses a qualitative descriptive method with a literary model, and uses the political theory approach of Ibn Khaldun. The findings obtained that the concept of the State is inseparable from human desires regarding their own interests, namely the interest in protection from various kinds of attacks or threats. While the form of a country depends on the system that applies or cannot be separated from the power that is dominating in an era and age.

Keywords: State, power, politics, Ibn Khaldun

Abstrak

Artikel ini mengulas dua term yaitu negara dan kekuasaan yang pada dasarnya memiliki penekanan makna yang berbeda dan bahkan saling bertentangan, namun pada prakteknya dalam kehidupan sosial kewarganegaraan dimaknai sebagai dualitas yang tidak bisa dipisahkan, karena memiliki kesenambungan dan saling membutuhkan. Negara sebagai sebuah organisasi adalah keniscayaan dalam kehidupan sosial, mulai dari struktur terkecil seperti keluarga hingga struktur lebih besar seperti masyarakat. Sementara itu bentuk sebuah negara tergambar pada sistem berlaku, yang terintegrasi sebagai kekuasaan untuk memerintah. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan model literer, dan menggunakan

pendekatan teori politik Ibnu Khaldun. Temuan yang diperoleh bahwa konsep Negara tidak terlepas dari keinginan manusia tentang kepentingannya sendiri, yaitu kepentingan akan perlindungan dari berbagai macam serangan atau ancaman. Sementara bentuk sebuah negara bergantung pada sistem yang berlaku atau tidak bisa lepas dari kekuasaan yang tengah mendominasi di sebuah era dan zaman.

Kata kunci: Negara, kekuasaan, politik, Ibnu Khaldun

Article History: *Reccived 11 September 2021, Revised: 04 October 2021, Accepted: 30 November 2021, Available online 01 December 2021*

Pendahuluan

Sejarah umat manusia kerap sekali berhubungan dengan sejarah politik yaitu tentang bagaimana kekuasaan, menguasai, dan bahkan peralihan kekuasaan. Harun Nasution menyatakan bahwa teori politik pertama kali timbul dalam lingkup umat Islam ialah tentang peralihan kekuasaan (Nasution, 1985: 101), yaitu pada sebuah peristiwa bersejarah dalam Islam tentang siapa yang paling berhak untuk mengganti Nabi sebagai pemimpin umat dan masyarakat ketika itu. Sehingga dalam suasana yang sedemikian itu, timbul perbedaan paham di bidang politik, baik dengan motif kepentingan sesaat atau pun kepentingan golongan dan sebagainya. Pada dasarnya kata politik itu sendiri berasal dari bahasa Yunani *polis* yang berarti “kota”, namun pada perkembangannya istilah politik berarti seni atau ilmu tentang pemerintahan atau suatu persoalan yang berkaitan dengan kepentingan banyak sebagai prinsip pengaturan dan pengawasan rakyat yang hidup dalam masyarakat (ma’arif, 1996: 11-12).

William T Bluhm menyebutkan bahwa politik adalah suatu proses sosial yang bercirikan aktifitas, yang menyangkut persaingan dan kerja sama dalam melaksanakan kekuasaan dan yang mencapai puncaknya dalam pembuatan putusan dalam kelompok (Zainuddin, 1992: 1). Oleh karena itu persoalan politik ialah persoalan yang timbul akibat kepentingan atau keinginan dari sekelompok entitas,

sebagaimana contoh di atas tentang pemilihan pemimpin suatu negara. Menurut Wilbur White dalam rangka memahami lebih dalam persoalan kepentingan manusia dalam membentuk suatu kelompok yang tersistem, harus memahami proses-proses negara dan pemerintahan serta mengetahui asal mula dan bentuk-bentuknya (Iswara, 1980: 38). Politik berlangsung dengan lingkungan yang di dalamnya telah berlaku sebuah sistem, demikian juga ilmu politik diterapkan untuk menganalisis interaksi dalam sistem tersebut (Rudy, 1993: 8-9).

Dengan adanya suatu sistem yang diterapkan maka konsepsi tentang siapa sumber kekuasaan negara; siapa pelaksana kekuasaan tersebut; apa dasar dan bagaimana cara-cara untuk menentukan kepada siapa kewenangan melaksanakan kekuasaan itu bertanggung jawab dan bagaimana bentuk tanggung jawab tersebut (Sjadzali, 1993: 2-3). Lebih jauh David Easton menyatakan bahwa suatu sistem dapat diperkenalkan sebagai sarana interaksi yang diabstraksikan dari semua tingkah laku sosial, melalui nilai-nilai dialokasikan dengan cara otortif kepada masyarakat (Haryanto, 1982: 2).

Ibnu Khaldun menuliskan panjang lebar dalam bukunya yang berjudul *Muqaddimah*, tentang masalah politik yang berhubungan dengan kekuasaan dan negara. Bahwa perbincangan tentang keduanya tidak akan lepas dari masalah pokok yang terdapat di dalamnya yaitu, tentang kehidupan manusia dalam masyarakat atau peradapan manusia (Zainuddin, 1992: 15-16). Sebagai landasan perlunya hadir sebuah negara dalam kehidupan manusia, Ibnu Khaldun menjelaskan bahwa dalam perkembangan sejarah manusia adalah makhluk sosial yang dengan sebab itu mereka membutuhkan apa yang disebut sebagai suatu kasawan (kota). Dalam teori kebutuhan, manusia memiliki kepentingan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehingga diperlukan seorang pemimpin dari kalangan mereka sendiri (Daswati, 2012: 783).

Berdasarkan pandangan tersebut, Ibnu Khaldun memberi suatu kesimpulan bahwa Negara tidak mungkin terwujud, tanpa adanya masyarakat. Dengan logika yang sama juga berlaku, bahwa manusia tidak mungkin bertahan hidup tanpa adanya kawasan kekuasaan yang disebut sebagai negara. Oleh karena itu negara dan kekuasaan sebagai dualitas yang tidak bisa dipisahkan, karena jika terjadi kekacauan di antara keduanya atau ketidak seimbangan-dengan istilah Giddens, tidak terjadinya penyatuan sistem dalam sebuah struktur-maka akan berdampak negatif pada bagian lainnya (Issawi, 1962: 139).

Oleh karena itu dapat diuraikan secara sederhana sebagai pendahuluan dalam artikel, bahwa antara konsep negara dan konsep kekuasaan terdapat upaya dari pihak pendukungnya masing-masing untuk menjadikan konsep pilihannya sebagai konsep utama dalam politik Ibnu Khaldun. Bahwa dalam prakteknya tidak ada negara yang lahir tanpa berlakunya sistem kekuasaan di dalamnya.

Konsep Negara

Asal Mula terbentuknya Negara

Ibnu Khaldun berpendapat bahwa manusia adalah makhluk sosial, yaitu yang memiliki kecenderungan alamiah untuk berkumpul atau bermasyarakat. Seseorang tidak akan bisa hidup sendiri, ia sangat membutuhkan orang lain yang selalu berada bersama-sama dengannya. adanya sebuah organisasi kemasyarakatan merupakan suatu keniscayaan dalam kehidupan sosial (Ibnu Khaldun, tt: 54).

Sejak manusia terlahir di dunia, pada dasarnya ia telah terlempar dalam suatu keadaan yang hanya mungkin hidup atau bertahan dengan bantuan makanan. Untuk mencukupi kebutuhan makanan manusia perlu mengerjakan beberapa pekerjaan, seperti dari butir-butir beras supaya menjadi nasi yang siap dimakan, memerlukan proses yang cukup panjang mulai dari menanam, memanen, mengupas, mencuci dengan

air, kemudian dipanaskan dalam wadah tertentu dan seterusnya. Proses kreatif ini kemudian disebut sebagai budaya manusia yang kemudian menjadi peradaban (Khaldun, tt 54).

Kreatifitas pada manusia selalu berkembang seiring dengan bertambahnya pengalaman manusia dalam kehidupan, berbeda dengan hewan yang tidak kreatif, kehidupan hewan cenderung bermusuhan satu sama lainnya sehingga tabiatnya hanya bertahan hidup secara naluriah dan sangat bergantung pada alam. Sementara itu manusia diberi kemampuan berfikir, dengan pemikirannya yang terus berkembang seiring bertambahnya pengalaman. Menurut Ibnu Khaldun setiap makhluk hidup termasuk manusia, memiliki kemampuan bertahan hidup secara alami, oleh karena setiap makhluk hidup memiliki senjata bawaan sebagai pertahanannya dari serangan musuh yang bisa mengancam jiwa. Misalnya hewan, setiap jenis hewan memiliki senjata bawaan lahir, ada dalam bentuk taring, kuku, kulit yang tebal, cangkang dan sebagainya, akan tetapi pada diri manusia berbeda apapun suku dan kebangsaannya dan lahir dalam konsisi apapun, semua manusia memiliki senjata yang seragam untuk bertahan hidup yaitu, kemampuan berpikir (khaldun, tt: 56). Kemampuan berpikir inilah kemudian yang membuat manusia lebih unggul dari pada makhluk lainnya, karena manusia sangat mudah untuk beradaptasi dengan lingkungan. Kemudian dengan kemampuan berpikir itu pula manusia didorong oleh keinginannya untuk berkelompok, yang kemudian berkembang menjadi organisasi.

Dari sini nyata bahwa kekuasaan merupakan tabiat yang melekat pada manusia yang secara mutlak perlu sekali. Para filosof berpendapat, watak itu juga dimiliki oleh beberapa jenis hewan seperti lebah dan belalang, yang mana semua kemampuan tersebut juga dimiliki oleh manusia berkat kemampuan berpikirnya (*fitrah*), (Ibnu Khaldun, tt: 56), dalam hal ini senada dengan firman Allah SWT dalam al-Quran Suarat Thaha ayat 50:

قَالَ رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ حَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى

Musa berkata: "Tuhan kami ialah (Tuhan) yang telah memberikan kepada tiap-tiap sesuatu bentuk kejadiannya, kemudian memberinya petunjuk.

Ayat di atas memaparkan keterangan bahwa semua makhluk hidup terlahir dalam bentuknya dan keunikannya masing-masing, begitu juga manusia pada akhirnya mendarai bahwa keunikan yang dimilikinya sebagai makhluk sosial, berarti juga memiliki sisi kelemahan. Kelemahan manusia terletak pada kehidupan yang tidak mampu dilaluinya sendiri. ia harus senantiasa dalam kelompoknya, yang memiliki keanekaragaman dan perbedaan karakter dan sebagainya, dengan demikian kemampuan unik pada setiap orang harus diorganisir supaya menjadi sebuah kekuatan yang lebih sempurna. Inilah cikal-bakal lahirnya sebuah negara, dengan dasar saling membutuhkan satu sama lainnya.

Dengan kata lain lahirnya sebuah negara merupakan hajat atau keinginan bersama dengan keasadaran bahwa manusia harus memanfaatkan segala potensi yang berbeda-beda dalam sebuah rumpun atau struktur fungsional. Krenemburg menyatakan bahwa negara terbentuk dengan dasar keinginan bersama, namun jangan bayangkan bahwa terdapat kumpulan dalam sebuah kesepakatan formal, justru awal mula terbentuknya berdasarkan kesepakatan yang tidak dinyatakan, melainkan keinsyafan (Nasroen, 1986: 85). Keinsyafan yang dimaksud hanya dapat dibuktikan dengan adanya kemauan yang realistis dalam perbuatan dan tindakan.

Keinginan bersama dari rakyat suatu negaralah yang menjadi dasar berjalannya negara, dan yang menjadi tujuan negara tersebut ialah mencapau kebahagiaan lahir dan batin menurut cara yang ditetapkan berdasarkan kemauan bersama. Sebagai manusia sosial maka dibutuhkan bantuan atau kerjasama dengan manusia lain, dari sini manusia

mengharuskan diri untuk hidup bermasyarakat atau bernegara.

Kebutuhan atas Pemimpin

Pemimpin adalah orang yang dibebankan untuk memimpin, ada pemimpin berarti ada yang dipimpin. Pemimpin juga memiliki kelas-kelas dan ruang lingkupnya, semakin luas area yang dipimpin semakin besar dan kompleks pula tanggung jawab yang dipikul oleh pemimpin tersebut, dalam sebuah hadis yang mashur “setiap orang adalah pemimpin dan akan diminta pertanggung jawaban atas apa yang dipimpinnya” (al-Hadist). Ibnu khaldun sendiri berpendapat bahwa jika terdapat sekelompok orang di suatu tempat, maka wajib di antara mereka diangkat mejadi pemimpin bagi yang lainnya (Fachruddin, 1986: 220). Dan hendaknya di antara mereka memilih yang paling adil atau dipercaya untuk berbuat adil dari mereka.

Kedudukan atau fungsi dari seorang pemimpin tidak lain ialah sebagai sosok yang memberi perintah pada yang dipimpinnya. Kepemimpinan merupakan kekuatan yang sangat penting dibalik kekuasaan berbagai organisasi dan bahwa untuk menciptakan organisasi yang efektif maka ruang lingkup kerja mengenai apa yang bisa mereka capai, kemudian memobilisasi organisasi itu untuk berubah kearah visi baru tersebut (Werren Bennis & Burt Nanus, 2006:2). Tidak dapat dipungkiri bahwa kesuksesan sebuah organisasi sangat ditentukan oleh faktor kepemimpinan. Di dalam kepemimpinan terdapat pemimpin dan pengikut.

Memang benar bahwa seorang pimpinan baik secara individual maupun sebagai kelompok, tidak mungkin dapat bekerja sendirian akan tetapi membutuhkan sekelompok orang lain yang dikenal sebagai bawahan, yang digerakkan sedemikian rupa sehingga para bawahan itu memberikan pengabdian dan sumbangsinya kepada organisasi, terutama dalam cara bekerja efektif, efisien, ekonomis dan produktif

Pemimpin berdasarkan konsep teoritis, memiliki tanggung jawab yang besar terhadap pencapaian tujuan suatu organisasi, karena kepemimpinan inti dari pada manajemen yang merupakan penggerak bagi sumber daya dan fungsi manajemen serta alat lainnya. Untuk menggerakkan sumber daya terutama sumber daya manusia atau pegawai diperlukan kualitas kepemimpinan seseorang. Salah satu faktor untuk menilai berkualitas tidaknya seorang pemimpin termasuk pendapat Werren Bennis & Burt Nanus (2006:3), mengatakan bahwa berperan kepemimpinan dapat dilihat dari aspek peran sebagai penentu arah, agen perubahan, juru bicara dan pelatih.

Ketiga aspek tersebut dapat dilaksanakan jika seorang pemimpin memiliki kemampuan untuk menerapkan gaya kepemimpinan untuk mempengaruhi para pengikutnya untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara efektif. Werren Bennis & Burt Nanus (2006:4) mengatakan bahwa sudah 850 definisi yang diberikan oleh banyak ahli selama 75 tahun terakhir, namun tidak ada pemahaman yang jelas dan tegas tentang apa yang membedakan pemimpin dan bukan pemimpin, akan tetapi menurut Bennis yang lebih penting adalah pemimpin yang efektif dan pemimpin yang tidak efektif dan organisasi efektif dan organisasi yang tidak efektif.

Memaknai pendapat Werren Bennis tersebut, bahwa para pemimpin dalam melaksanakan kepemimpinan pada sebuah organisasi dituntut melaksanakan peran kepemimpinan untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia agar dapat lebih efektif dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pelaksana administrasi dalam sebuah organisasi. Untuk mempengaruhi sumberdaya pegawai kearah pencapaian tujuan, tidak semudah apa yang dibayangkan, karena sumber daya pegawai memiliki karakteristik yang berbeda-beda, sehingga membutuhkan gaya kepemimpinan seorang pemimpin untuk menggerakkannya. Gaya kepemimpinan merupakan norma perilaku yang digunakan oleh seseorang pada saat orang tersebut mencoba

mempengaruhi perilaku orang lain (Thoha, 2004: 51). Hersey dan Blanchard (1982) menyatakan bahwa gaya kepemimpinan merupakan pola-pola perilaku konsisten yang mereka terapkan dalam bekerja dengan melalui orang lain seperti dipersepsikan orang-orang itu

Perlu disadari bahwa sumberdaya manusia merupakan suatu potensi kesuksesan untuk mengimbangi perubahan dan kemajuan dalam sebuah organisasi dan berpengaruh terhadap efektivitas kerja pimpinan dan efektivitas organisasi. Keseluruhan tugas hanya akan bermanfaat dan berhasil baik, apabila diusahakan oleh kerjasama antara pimpinan dan yang dipimpin. Dengan adanya kerjasama diharapkan seorang pemimpin mempunyai kemampuan kerja yang serbaguna, berhasil guna dan dapat bekerja sesuai kebutuhan serta tuntutan organisasi dimana ia bekerja. Di dalam kepemimpinan ada pemimpin, dipimpin dan situasi, sebagaimana yang dinyatakan oleh Yukl (2001:13) membahas tentang kepemimpinan ada tiga domain yang saling berhubungan yaitu pemimpin, dipimpin dan Situasi.

Konsep Kekuasaan

Ashabiyah (Solidaritas Kelompok)

Pengertian dan Asal Usul *Ashabiyah* Istilah *‘ashabiyah* berasal dari bahasa arab yang artinya semangat kolektif yaitu golongan, atau partai (A.W. Munawwir, 1997: 936). Adapun secara harfiah *ashabiyah* berarti rasa satu kelompok. Kemudian menurut Charles Issawi dalam buku Wendy Melfa, menyatakan *‘ashabiyah* adalah faktor penggerak kekuasaan dan para pendukungnya untuk maju terus ke depan. *Ashabiyah* sebagaimana diutarakan Ibnu Khaldun adalah rasa cinta/fanatisme seseorang terhadap keturunan, keluarga, dan golongannya. Perasaan kasih dan cinta timbul secara alami sebagai sifat dasar manusia yang merupakan pemberian Allah. Dengan sifat tersebut muncul sikap saling menolong dan membantu (Khaldun, tt: 28).

Dalam ungkapan lain, *ashabiyah* merupakan jerit tangis seseorang terhadap penderitaan kerabatnya, walau bagaimana pun bentuk hubungan kekerabatan tersebut. Hal ini dikarenakan pertalian darah yang secara psikologis mengikat pada kebanyakan umat manusia, dan merupakan tabiat untuk menjalin hubungan emosional dengan orang yang disayangi dan dihormati (Syafiuddin, 2007: 90).

Kemudian asal usul 'ashabiyah itu adalah pemuliaan ikatan darah yaitu sesuatu yang tabi'i pada watak manusia, dengan sedikit pengecualiannya. Ikatan itu menimbulkan cinta pada kaum kerabat, dan keluarga seseorang. Lebih jelasnya Ibnu Khaldun mengatakan bahwa asal usul 'ashabiyah berawal dari pemuliaan ikatan darah adalah sesuatu yang tabi'i pada watak manusia. Ikatan itu menimbulkan cinta pada kaum kerabat dan keluarga seseorang, dengan membangkitkan perasaan supaya hendaknya janganlah ada cedera atau bencana yang datang menimpa mereka itu. orang akan merasa malu jika kaum kerabatnya diperlakukan tidak baik ataupun diserang, dan orang itu akan turut turun tangan untuk meleraikan antara mereka dengan bahaya atau kehancuran apapun yang mengancam mereka itu. inilah satu dorongan tabi'i pada manusia sejak makhluk manusia itu muncul di dunia (Osman Raliby, 1978: 156).

Setelah mengkaji tentang pendorong terbentuknya 'ashabiyah, dapat dimengerti bahwa 'ashabiyah tidak hanya berdasarkan ikatan kekeluargaan atau rasialisme, akan tetapi Ibnu Khaldun memperluas ruang lingkup 'ashabiyah pada solidaritas sosial yang terdapat di kalangan orang-orang desa dan juga di kalangan orang-orang kota. Berkaitan dengan hal tersebut, tidak menutup kemungkinan bahwa *ashabiyah* dapat berarti partai, patriotisme, dan nasionalisme (Deliar Noer, 1983: 56). Nampaknya deliar Noer melihat perkembangan kehidupan negara zaman modern ini, agaknya ikatan nasionalisme itu akan disebut juga oleh Ibnu Khaldun sebagai ikatan *ashabiyah*.

Konsep 'ashabiyah mempunyai perang penting dalam mencegah konflik dan ketidakadilan dan untuk menjaga kebersamaan masyarakat, hal ini karena kapasitas individu yang tidak memungkinkan mereka memenuhi kebutuhan dasarnya atau bahkan mempertahankan diri. Umat manusia secara alamiah adalah kelompok sosial dan cenderung untuk hidup bersama. Manusia sangat memerlukan bantuan dan kerjasama dengan yang lain, tetapi manusia tidak dapat hidup bersama dan bekerjasama dalam suasana konflik, permusuhan dan ketidakadilan. Hal-hal tersebut akan membuat kehidupan sosial tidak mungkin dapat diwujudkan. Untuk itulah diperlukan 'ashabiyah dan kekuatan pengendalian atau pemerintah (Hanna Widayani, 2017: 149-162).

Ashabiyah adalah rasa solidaritas sosial yang di dalamnya terdapat suku-suku atau kelompok yang bekerjasama untuk kepentingan bersama. Akan tetapi rasa solidaritas sosial tersebut akan hancur bilamana suatu suku atau kelompok tersebut terpecah belah atau tidak mau lagi bekerjasama. Karena alasan inilah, persekutuan suatu kelompok atau suku memerlukan hadirnya seorang penguasa atau raja yang mampu menangkal agresi. Kebutuhan akan adanya seseorang yang mempunyai otoritas dan bisa mengendalikan ini kemudian meningkat. Didukung dengan rasa kebersamaan yang terbentuk bahwa seorang pemimpin dalam mengatur dan menjadi penengah tidak dapat bekerja sendiri sehingga membutuhkan kemampuan tentara yang kuat dan loyal sebagai pertahanan bangsa, perdana menteri, serta pembantu-pembantu yang lain hingga terbentuklah sebuah dinasti (daulah) atau kerajaan (Hanna Widayani, 2017: 149-162).

Adanya 'ashabiyah (solidaritas sosial) yang kuat merupakan suatu keharusan bagi banggunya suatu negara atau dinasti besar. Oleh karenanya jarang terjadi suatu negara dapat berdiri di suatu kawasan di mana terdapat beraneka ragam suku. Sebab dalam keadaan yang demikian masing-

masing suku mempunyai kepentingan dan aspirasi yang berbeda-beda satu sama lain, dan tiap kepentingan dan aspirasi suku-suku tersebut didukung oleh 'ashabiyah suku, atau dengan kata lain dinasti yang besar dan kuat hanya dapat berdiri apabila terdapat homogenitas, sehingga menimbulkan solidaritas sosial yang kuat (Hanna Widayani, 2017: 149-162).

Untuk menampung kepentingan dan aspirasi masyarakat yang terdiri dari berbagai macam suku diperlukan sebuah wadah yang bernama negara. Namun demikian negara tidak akan bertahan lama atau akan mengalami kehancuran jika masyarakatnya tidak mau lagi bekerjasama dan berpecah belah. Oleh karena itu diperlukan seorang pemimpin atau kepala negara yang mampu menangkai agresi, mengendalikan dan mengatur negara

Peran Agama

Ibnu Khaldun berkeyakinan bahwa pemerintahan yang ideal harus berdasarkan pada agama. Hal demikian karena sesuai dengan kodratnya, manusia diciptakan untuk kehidupan dunia dan akhirat. Pemerintah yang berdasarkan agamalah yang dapat membawa kebahagiaan manusia tidak hanya di duni melainkan juga di akhirat. Ibnu Khaldun juga menyatakan bahwa pada masa Nabi Muhammad pemerintahan negara yang berdasarkan agama atau wahyu tuhan ini langsung dibawah kepemimpinan Nabi Muhammad, maka pascawafatnya Nabi Muhammad, khalifah adalah perwakilan Nabi Muhammad dalam pembuatan undang-undang agar pemerintahannya ini tetap sesuai dengan agama (Abdul Qadir Abu Fariz, Muhammad, 2000: 102).

Meskipun negara yang berdasarkan agama menurut Ibnu Khaldun adalah yang terbaik, namun Ibnu Khaldun juga berpendapat bahwa pemerintahan berdasarkan agama ini hanya berjalan dan berlaku pada zaman Nabi Muhammad dan Khulafaur Rasyidin yang empat saja. Pemerintah berdasarkan agama bagi Ibnu Khaldun berakhir sejak berdirinya pemerintahan dinasti yang berdasarkan pada kekuatan

otoritas raja atau sultan. Oleh karenanya pemerintahan berdasarkan agama hanya berlaku dan cocok pada masa awal Islam saja. Kemudian setelah itu sesuai dengan tabiat alami sebuah peradaban, pemerintahan atau kekuasaan semata-mata berdasarkan kebijaksanaan dan rasio akal dengan mengandalkan kekuatan kolektif.

Menurut Ibnu Khaldun kekuasaan yang terintegrasi dengan agama telah berakhir dengan berakhirnya Khulafaur Rasyidin. Oleh karenanya bagi Ibnu Khaldun, kekuasaan berdasarkan agama juga bukan merupakan sebuah kewajiban. Keberadaan agama tidak bersifat kodrati dan mutlak harus ada dalam kekuasaan. Kekuasaan negara tetap ada walaupun tanpa adanya agama. Adanya kekuasaan merupakan watak alami sebuah peradaban. Banyak bangsa dapat berdiri tegak tanpa dasar agama atau Nubuwwah atau belum sampainya dakwah agama pada mereka. Fakta sejarah juga menyebutkan bahwa tidak hanya kekuasaan berdasarkan agama yang eksis di dunia, bahkan kekuasaan yang berdasarkan rasio juga eksis, malah dengan jumlah yang lebih besar. Walaupun menurut Ibnu Khaldun agama bukan merupakan suatu yang kodrati harus ada dalam sebuah kekuasaan, namun keberadaan agama dalam kekuasaan tetap memberikan peran penting (Ahmad Khalwani, 2019: 107-120).

Menurut Ibnu Khaldun ada tiga peran penting agama dalam kekuasaan yaitu pertama, agama merupakan pedoman dan petunjuk agar negara senantiasa berada dalam bimbingan moral dan etik. Kedua, agama sebagai faktor pemersatu dan pendorong keberhasilan proses kekuasaan. Ketiga, agama sebagai legitimasi dari sistem politik. Menurut Ibnu Khaldun, tuntutan peradaban untuk memisahkan integrasi agama dengan kekuasaan ini sebenarnya tidak bertentangan dengan agama. Jika dipahami dengan benar sejatinya tujuan kekuasaan memiliki kesesuaian dengan tujuan diberlakukannya agama. Artinya tujuan kekuasaan adalah untuk kesejahteraan masyarakat, begitupun pula tujuan

berlakunya agama adalah untuk kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, relasi agama dan negara tidak dapat dipertentangkan. Dalam sebuah negara yang agama itu menjadi integral ataupun yang sekuler maupun yang simbiotik, tujuan kekuasaan atau negara adalah satu yaitu mensejahterakan masyarakat dan mempertahankan kehidupan manusia.

Dengan Demikian ada dan tidaknya suatu agama dalam kekuasaan, kekuasaan harus tetap ada. Keterlibatan agama dalam sebuah kekuasaan akan memperkuat sebuah negara karena bantuan nilai agama membuat moral masyarakat semakin baik, dan moral yang baik adalah sesuatu yang sangat memperkuat kekuasaan. Dengan demikian menjadi nyatalah apa yang diungkapkan Ibnu Khaldun bahwa kekuasaan ataupun negara adalah sebuah keharusan dalam peradaban atau watak alami peradaban ada atau tidaknya sebuah agama.

Kesimpulan

Berlandaskan apa yang telah diurai sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan bahwa konsep negara dan kekuasaan dalam pandangan politik Ibnu khaldun ialah sebuah kepentingan atau kebutuhan manusia itu sendiri. Bisa dikatakan juga hadirnya atau terlahir suatu kawasan (baik dalam bentuk Negara/organisasi dan sebagainya) tidak terlepas dari kekuasaan di dalamnya, sebagai sistem yang melekat. Adapun kekuasaan menurut Ibnu Khaldun ialah kekuatan yang lahir dari kolektifitas atau solidaritas dan keyakinan yang dibentuk oleh agama. Sementara bentuk sebuah negara bergantung pada sistem yang berlaku atau tidak bisa lepas dari kekuasaan yang tengah mendominasi di sebuah era dan zaman.

Daftar Rujukan

- A.W. Munawwir, 1997. *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progresif.
- Abdul Qadir Abu Fariz, Muhammad. (2000). *Sistem Politik Islam*. Jakarta: Robbani Pers

- Ahmad Khalwani, 2019. “*Ashabiyah* Ibnu Khaldun Dan Relevansinya Dengan Nasionalisme Di Indonesia, *Jurnal Mantiq*, Vol. 2 No. 2
- Ahmad Khalwani, 2019. “Relasi Agama dan Negara Dalam Pandangan Ibnu Khaldun” *Jurnal Resolusi*, Vol. 2, No. 2
- Daswati, 2012 “Implementasi Peran Kepemimpinan Dengan Gaya Kepemimpinan Menuju Kesuksesan Organisasi” *Jurnal Academica*, Vol. 4, No. 01.
- Deliar Noer, 1983. *Pemikiran Politik di Negeri Barat*, Jakarta: Rajawali.
- Haryanto, 1982. *Sistem Politik, Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty.
- Ibnu Khaldun, Abdurrahman. Tt. *Muqoddimah*. Beirut: Dar Al fikr.
- Ma’arif, A. Syafi’i. 1996. *Ibnu Khaldun dalam pandangan Penulis Barat dan Timur*, Jakarta: Gema Insani Press.
- Nasution, Harun. 1979. *Islam ditinjau dari berbagai Aspeknya*, Jakarta: UI Press
- Osman Raliby, 1978. *Ibnu Khaldun Tentang Masyarakat Dan Negara*, Jakarta: Bulan Bintang.
- Rudy, Teuku May. 1993. *Pengantar Ilmu Politik: Wawasan Pemikiran dan Kegunaannya*, Bandung: Erousco.
- Sjadzali, H. Munawir. 1993. *Islam dan Tata Negara*, Jakarta: UI Press.
- Syafiuddin, 2007. *Negara Islam Menurut Konsep Ibnu Khaldun*, Yogyakarta: Gama Media,
- Thoha, 2002a. *Kepemimpinan dalam Manajemen*. Jakarata: Raja Grafindo Persada
- Werren Bennis & Burt Nanus, 2006. *Leaders Strategi untuk Mengemban Tanggung Jawab*. PT.Buana Ilmu Populer Kelompok Gramedia: Jakarta

- Yukl, Gary A. 1994a. *Leadership in Organization*. Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice Hall International Inc
- Zainuddin, A. Rahman. 1992. *Kekuasaan dan Negara: Pemikiran Politik Ibnu Khaldun*, Jakarta: PT. Gramedia.